

## SKRIPSI

# KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGADAKAN KERJASAMA DENGAN PEMERINTAH DAERAH DI LUAR NEGERI



MILIK  
PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA

**NURUL MUZAIDAH**  
**NIM. 030015145**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2004**

**KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM  
MENGADAKAN KERJASAMA  
DENGAN PEMERINTAH DAERAH DI LUAR NEGERI**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Dosen Pembimbing,**

**Penyusun,**

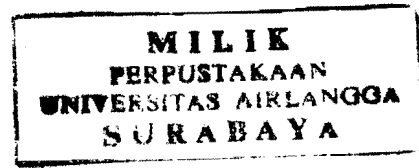
**Sri Winarsi, S.H., M.H.**  
**NIP. 132049479**

**Nurul Muzaidah**  
**NIM. 030015145**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2004**

## BAB IV

### PENUTUP



#### Kesimpulan

1. Prosedur kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan pemerintah Daerah di luar negeri dimulai dengan adanya undangan dari salah satu pihak yang berniat untuk mengadakan kerjasama. Setelah itu kedua negara masing-masing mengadakan penjajagan untuk melihat potensi masing-masing daerah dengan syarat kerjasama tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, saling menguntungkan kedua belah pihak dan adanya persamaan karakter dalam bidang yang akan di kerjasamakan nantinya. Hasil pertemuan dalam penjajagan yang dilakukan oleh kedua pemerintah daerah disebut Record of Visits/Managee of meeting yang nantinya setelah kembali ke daerah masing-masing harus dilaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Apabila DPRD menyetujui maka dikeluarkan surat persetujuan dari ketua DPRD. Setelah itu kedua pemerintah daerah mengadakan pertemuan lagi untuk membahas LoI yang merupakan tindak lanjut dari pertemuan pertama yang merupakan pernyataan kehendak tertulis dari kedua pemerintah daerah untuk mengadakan kerjasama belum sampai pada perumusan implimentasinya dan ditandatangani oleh Kedua Kepala Daerah. Setelah terbentuk LoI maka Pemerintah Daerah memberitahu Ke Departemen Dalam Negeri bahwa pihaknya telah menyepakati Record of Visits dan LoI dengan Pemerintah daerah di luar negeri. Selanjutnya dengan surat pengantar dari Departemen Dalam Negeri maka Departemen Dalam Negeri memberitahu



Departemen lain ditingkat pusat yakni Departemen Luar Negeri, Badan Intelijen Nasional dan Sekretariat Negara untuk mengadakan musyawarah mengenai rencana penyusunan MoU. Setelah setuju, maka Pemerintah Daerah mengirimkan rancangan MoU tersebut kepada DPRD untuk meminta persetujuan dan kepada Pemerintah Daerah di luar negeri. Apabila DPRD dan pemerintah daerah di luar negeri setuju, maka Departemen Luar Negeri mengeluarkan surat Kuasa/ Full Powers yang berisi siapa pejabat yang berwenang untuk menandatangani MoU tersebut.

2. Pengawasan dalam pelaksanaan kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan pemerintah daerah di luar negeri bersifat preventif dan represif. Pengawasan preventif ini dimulai ketika Pemerintah daerah meminta persetujuan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam mengadakan kerjasama. Selain itu dalam penyusunan MoU dimusyawarahkan ditingkat pusat oleh Departemen Luar Negeri, Badan Intelijen Nasional dan Sekretariat Negara. Apabila diduga kerjasama tersebut hanya akan merugikan, maka pemerintah berwenang untuk membatalkan tindak lanjut kesepakatan yang akan ditandatangani oleh pemerintah daerah.

Pengawasan Represif dilakukan apabila dalam pelaksanaan kerjasama tersebut ada salah satu pihak yang tidak menepati isi dari kesepakatan yang telah dituangkan dalam MoU, maka Pemerintah Daerah setelah mendengar petunjuk dari Instansi/Departemen di pusat maka ia berhak untuk tidak memperpanjang kerjasama tersebut. Selain itu Departemen Dalam Negeri berhak untuk membatalkan MoU yang tidak dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam MoU. Namun sebelum sampai tahap

pembatalan tersebut hendaknya kedua belah pihak (pemerintah daerah) mengadakan musyawarah atau meminta klarifikasi sehubungan dengan isi dari MoU yang tidak dilaksanakan.

**Saran.**

1. Prosedur kerjasama luar negeri tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Hendaknya dibuat suatu peraturan yang khusus mengatur prosedur kerjasama luar negeri sekaligus wewenang yang diberikan kepada masing-masing Departemen dan wewenang yang diberikan kepada pejabat yang melakukan kerjasama tersebut.
2. Hendaknya didirikan suatu lembaga khusus dalam rangka mengawasi pelaksanaan isi dari kesepakatan yang dituangkan dalam MoU yang tentunya dibentuk oleh kedua negara yang mengadakan kerjasama selain itu hendaknya juga diawasi oleh pihak ketiga yang netral yang berguna sebagai penengah dalam menyelesaikan suatu perselisihan.